

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan organisasi regional yang ada di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk pada tahun 1967. Tujuan ASEAN sendiri adalah pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara; Kedua, Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional; Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi; Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada; Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara (ASEAN Portal, 2024). Dalam merealisasikan tujuannya tersebut kemudian ASEAN beberapa kali membuat agenda yang melibatkan negara-negara anggotanya. Dengan banyaknya perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh organisasi regional ini, lima negara Asia Tenggara lainnya ikut bergabung. Salah satu negara yang bergabung ialah Vietnam. Vietnam merupakan negara kedua setelah Laos yang ikut bergabung bersama ASEAN. Tujuan bergabungnya Vietnam dipengaruhi beberapa faktor seperti, pertumbuhan ekonomi, kemandirian politik, peluang kerjasama internasional, dan keinginan untuk memainkan peran yang lebih aktif di kawasan Asia Tenggara (Tu, 2021).

Pada awal tahun 1950-an di Vietnam masih mengalami masa kesulitan. Hal ini diakibatkan oleh konflik internal antara Vietnam Utara dan Selatan, yang menghambat perkembangan ekonominya. Pada tahun 1955, Vietnam utara dan selatan berpisah menjadi dua negara yang berbeda, dan perekonomian negara ini masih dalam keadaan yang sangat sulit.

Namun, setelah kemenangan Vietnam Utara dalam perang, perekonomian negara ini mulai membaik. Di tahun 1975, Vietnam Utara dan Selatan terintegrasi menjadi satu negara yang disebut Republik Sosialis Vietnam. Perekonomian negara ini didukung oleh bantuan dari Uni Soviet dan Cina. Dan kemudian di tahun 1986, Vietnam mengadopsi kebijakan ekonomi baru yang disebut "Doi Moi" yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara ini dengan cara meningkatkan investasi asing dan meningkatkan produksi. Kemudian, tahun 1987 menyaksikan peluncuran kebijakan reformasi ekonomi yang dikenal sebagai "Đổi Mới", yang bertujuan untuk membuka pintu bagi investasi asing dan meningkatkan produksi domestik (Cima, 1989). Kebijakan ini membawa dampak positif dalam memperbaiki kondisi ekonomi Vietnam, terutama dengan masuknya Vietnam ke dalam organisasi regional seperti ASEAN pada tahun 1995.

Perekonomian Vietnam terus membaik dengan adanya kebijakan "Đổi Mới". Pada tahun 1996, Vietnam mengadopsi kebijakan ekonomi yang disebut "Kebijakan Ekonomi Baru" yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara ini dengan cara meningkatkan investasi asing dan meningkatkan produksi (Van Thuy, 2020). Pada tahun 2002, Vietnam mengikuti program *IAI Work Plan* yang diasosiasikan oleh ASEAN.

Masuknya empat negara anggota terbaru ke dalam ASEAN; Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam telah memicu kekhawatiran mengenai potensi munculnya “Two-Tier ASEAN”. Situasi ini semakin memperburuk kesenjangan pembangunan, yang tidak hanya terlihat pada perbedaan rata-rata pendapatan perkapita antara lima Negara Anggota ASEAN awal dan empat anggota baru, namun juga dalam hal sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia, serta tingkat daya saing.

Jika dilihat dari lima anggota awal ASEAN, pendapatan perkapita vietnam masih tertinggal jauh yang mana berdasarkan data World Bank pada tahun 2000 saja vietnam hanya menghasilkan \$394.6 yang mana dalam hal ini Vietnam berada pada urutan 7 dari 10 anggota ASEAN. Dibandingkan dengan Negara Anggota ASEAN awal yang mana pada tahun tersebut pendapatan perkapitanya sebagai berikut, Singapura \$23,852.8; Malaysia \$4,087.6; Thailand \$2,004.1; Filipina \$1,073.3; dan disusul Indonesia \$770.9.

Dilain sisi, berbicara mengenai kesenjangan Ekonomi di Vietnam tidak terlepas dengan ketidaksetaraan pendapatan. Sebelum tahun 2000, ketimpangan pendapatan di Vietnam disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Wilayah utara umumnya lebih maju dan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dibandingkan dengan wilayah selatan yang kurang berkembang. Kesenjangan geografis ini tidak hanya menyoroti ketidakseimbangan regional tetapi juga menggarisbawahi masalah yang lebih luas tentang akses yang tidak setara terhadap sumber daya dan peluang di dalam negeri.

Hal ini bukan hanya mengenai utara dan selatan. Namun, jika berbicara ketidaksetaraan maka tidak terlepas juga kita membahas mengenai ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini sangat dirasakan oleh masyarakat pedesaan, di mana perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan sangat signifikan, dengan daerah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan pendapatan yang mereka peroleh jauh lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Selain itu, ketimpangan pendidikan dan pasar tenaga kerja merupakan kontributor signifikan terhadap ketidaksetaraan pendapatan. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi dan memiliki kesempatan kerja yang lebih baik memiliki pendapatan yang lebih tinggi, sementara mereka yang berpendidikan lebih rendah dan memiliki kesempatan kerja yang terbatas memiliki pendapatan yang lebih rendah (Dang et al., 2022).

Meskipun berbagai upaya pengentasan kesenjangan Ekonomi telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara keseluruhan, hal ini tidak serta merta mengatasi akar penyebab kesenjangan pendapatan. Kelompok masyarakat termiskin tidak mendapatkan manfaat sebesar kelompok masyarakat lainnya, sehingga kesenjangan pendapatan semakin melebar.

Perbandingan pendapatan perkapita yang sangat besar antara vietnam dan lima negara awal ASEAN dan adanya kesenjangan yang dipengaruhi oleh pembangunan yang tidak merata di berbagai wilayah, ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan ketimpangan pendidikan dan pasar tenaga. Berdasarkan hal-hal tersebut kemudian menjadi konsen yang cukup besar bagi ASEAN.

Dengan latar belakang kekhawatiran mengenai potensi munculnya *Two-Tier* ASEAN dan melihat bagaimana kondisi ekonomi di negara-negara anggota baru terutama di Vietnam. Para Pemerintahan ASEAN, pada pertemuan KTT mereka pada bulan November 2000 di Singapura, mengadopsi sebuah program khusus untuk mempersempit kesenjangan pembangunan, yang dinamakan "*Initiative for ASEAN Integration* " atau "IAI".

Initiative for ASEAN Integration (IAI) merupakan sebuah inisiatif strategis yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 2000 untuk membantu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (yang secara kolektif dikenal sebagai negara-negara CLMV) dalam mengintegrasikan diri secara lebih efektif ke dalam komunitas ASEAN. Inisiatif ini terutama bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pembangunan antara negara-negara anggota yang lebih baru dan negara-negara ASEAN yang lebih maju, untuk memastikan pertumbuhan regional yang kohesif dan inklusif. (ASEAN Secretariat, 2016).

IAI Work Plan berfungsi sebagai kerangka kerja terperinci untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan IAI. Setiap iterasi Work Plan mencakup beberapa tahun, menguraikan proyek dan program spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan negara-negara CLMV. Work Plan ini ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk menjawab prioritas yang berkembang dalam kerangka kerja ASEAN. Elemen-elemen kunci dari IAI Work Plan mencakup proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan transportasi, energi, dan komunikasi, sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan kegiatan ekonomi. Selain itu, terdapat pula inisiatif yang berfokus

pada pengembangan sumber daya manusia yang mencakup pendidikan, pelatihan kejuruan, dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja di negara-negara CLMV.

Integrasi ekonomi merupakan aspek penting lainnya dari IAI Work Plan, dengan program-program yang dirancang untuk memfasilitasi perdagangan, mempromosikan investasi, dan menyelaraskan peraturan, sehingga membantu negara-negara CLMV untuk berintegrasi secara lebih efektif ke dalam ekonomi regional. Pengembangan kapasitas kelembagaan juga merupakan fokus yang signifikan, dengan upaya yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan kerangka kerja kelembagaan untuk memastikan negara-negara ini dapat secara efektif menerapkan dan mendapatkan manfaat dari inisiatif regional.

Pelaksanaan dan pengawasan *IAI Work Plan* dikelola oleh *IAI Task Force*, yang memberikan arahan strategis, kepemimpinan, dan melakukan tinjauan rutin untuk memastikan pelaksanaan proyek dan program yang efektif. Gugus tugas ini juga berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional, untuk memobilisasi sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk inisiatif ini (ASEAN, 2024).

Upaya-upaya bersama ini telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih seimbang di seluruh kawasan ASEAN, mendorong komunitas regional yang lebih inklusif dan kohesif. Implementasi berkelanjutan dari *IAI Work Plan* memastikan bahwa anggota ASEAN yang lebih baru dapat secara progresif berintegrasi dan mendapatkan manfaat dari kerangka kerja

ekonomi dan politik regional yang telah ditetapkan oleh ASEAN.

Melihat kondisi perekonomian vietnam yang berusaha bangkit setelah perang yang pecah di tahun 1950-an dan pada akhirnya vietnam bergabung dengan ASEAN. Dan tindakan ASEAN dalam mendukung penyatuan integrasi negara-negara anggotanya dan mempersempit kesenjangan pembangunan terutama anggota yang baru bergabung termasuk Vietnam melalui program *IAI Work Plan* yang dibawah langsung oleh IAI, serta meningkatkan daya saing ASEAN sebagai sebuah kawasan. Dari pemaparan yang dijelaskan tadi, penulis mencoba untuk melihat bagaimana pengimplementasian dari *IAI Work Plan* ini di vietnam dan apakah *IAI Work Plan* ini memberikan dampak yang signifikan dalam membantu vietnam dalam mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi di negaranya. Hal-hal tersebut kemudian yang menjadi faktor yang menjadi alasan penulis merumuskan judul penelitian “Peran *Initiative for ASEAN Integration* dalam mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi di Vietnam melalui *IAI Work Plan*.”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis membatasi permasalahan pada rentang 2016-2020 yang mana pada tahun tersebut adalah pelaksanaan dari *IAI Work Plan III*. Untuk mempermudah penulis dalam menulis, berikut rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi *Initiative for ASEAN Integration Work Plan III* di Vietnam?
2. Bagaimana *IAI Work Plan III* berdampak dalam mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi di Vietnam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

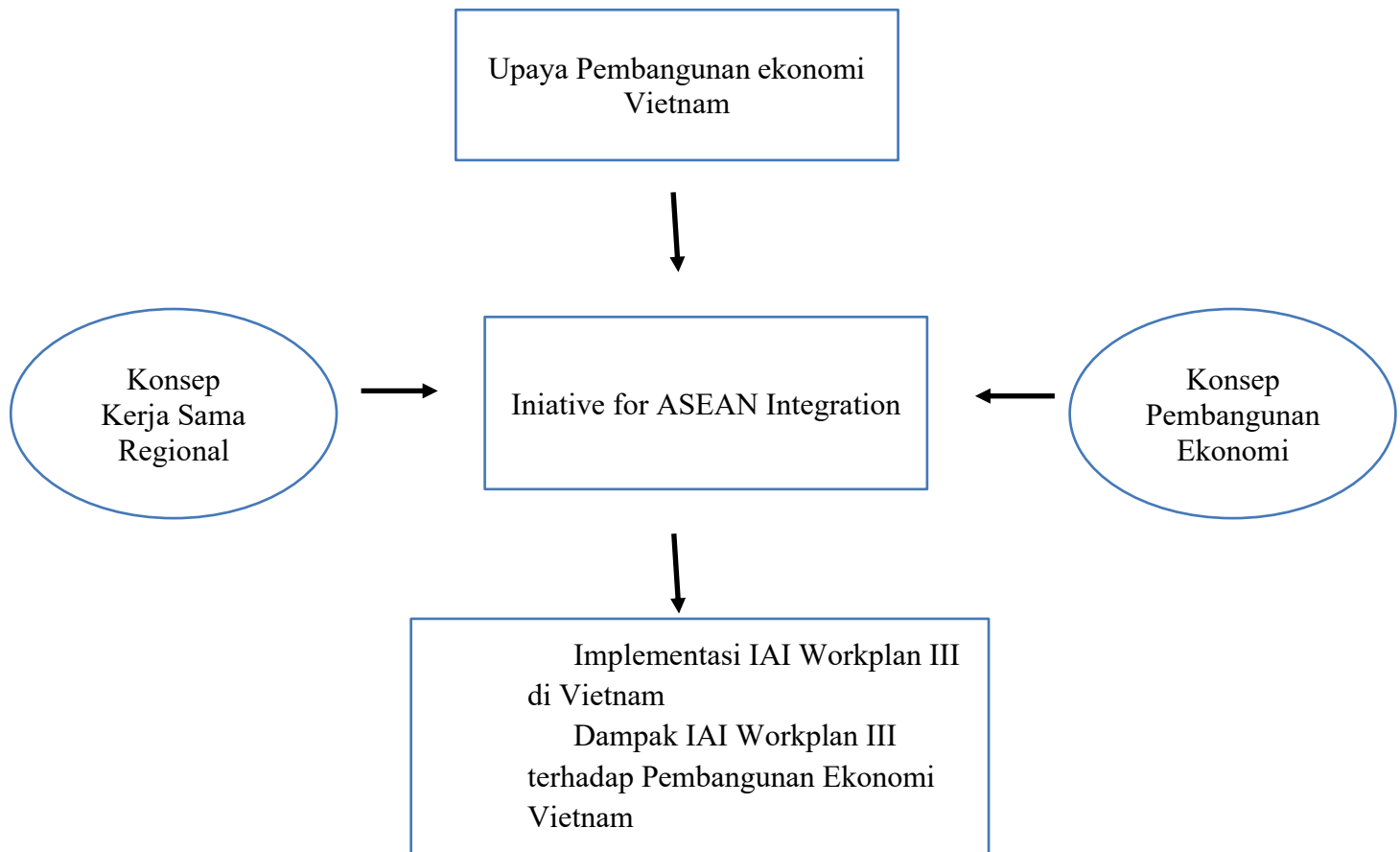
1. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian *Initiative for ASEAN Integration Work Plan III* di Vietnam.
2. Untuk mengetahui pengaruh peran *IAI Work Plan III* terhadap kesenjangan pembangunan ekonomi di Vietnam.

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menambah pemahaman mengenai peran *IAI Work Plan III* melalui cara pengimplementasian dan dampak dari *IAI Work Plan III* dalam mengurangi kesenjangan Ekonomi di Vietnam.
2. Bagi akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa Hubungan Internasional yang sedang menempuh masa studinya di jurusan

Hubungan Internasional.

D. Kerangka Konseptual



Penelitian ini menggunakan Konsep Kerja Sama Regional dan Konsep Pembangunan Ekonomi untuk menjelaskan variabel topik yang akan diteliti. Konsep Kerja Sama Regionalisme dan Pembangunan Ekonomi akan membantu penulis dalam mengurai Implementasi IAI Work Plan III di Vietnam dan dampak

dari IAI *Work Plan* terhadap kesenjangan pembangunan ekonomi di Vietnam.

1. Kerja Sama Regional

Kerja Sama Regional adalah kolaborasi antara negara-negara dalam suatu kawasan geografis tertentu untuk mencapai tujuan bersama, seperti peningkatan ekonomi, stabilitas politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Negara-negara dalam suatu kawasan sering memiliki hubungan ekonomi dan politik yang saling bergantung, sehingga kerjasama regional memungkinkan mereka mengatasi masalah-masalah bersama yang tidak dapat diselesaikan secara efektif secara individu. Selain itu, kerjasama regional memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan ekonomi skala, memperkuat posisi tawar-menawar dalam negosiasi internasional, serta membangun infrastruktur dan teknologi secara kolektif (Narine, 2002).

Keberagaman kondisi geografis suatu negara dapat menimbulkan tantangan signifikan yang terkait dengan potensi masing-masing negara. Setiap negara memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sumber daya mereka, namun jarang ada negara yang memiliki semua elemen yang diperlukan untuk pembangunan mandiri. Oleh karena itu, hambatan dalam mencapai tujuan ini seringkali menjadi dasar untuk menjalin kolaborasi dengan negara-negara lain, terutama yang berdekatan secara geografis.

Selain itu, kebutuhan negara-negara untuk menghadapi tantangan globalisasi, yang mencakup persaingan ekonomi yang semakin ketat, kebutuhan akan stabilitas politik, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. dan

Globalisasi inilah yang menjadi latar belakang munculnya konsep kerja sama regional, yang mana kerja sama tidak hanya terbatas pada hubungan bilateral tetapi juga mencakup kolaborasi regional dalam berbagai bidang yang saling berkaitan (Söderbaum & Hettne, 2006).

Tidak dapat dipungkiri proses globalisasi di suatu negara memang kompleks dan berdampak luas terutama pada aspek perekonomian. Negara-negara yang terpapar globalisasi umumnya mencapai pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan penurunan kemiskinan lebih signifikan dibandingkan dengan negara-negara yang kurang terdampak. Negara-negara yang tidak terkena dampak globalisasi seringkali kesulitan bersaing di pasar internasional dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Banyak dari negara-negara ini tidak mampu memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi. Oleh karena itu, negara-negara ini berlomba untuk melakukan kerja sama dengan negara yang masih dalam satu kawasan melalui organisasi regional.

Dalam konsep ini akan membantu penulis untuk memahami peran IAI melalui kerangka kerja *IAI Work Plan* dalam pembangunan ekonomi di Vietnam melalui kerja sama tingkat regional. Dalam kerangka *IAI Work Plan*, kerja sama regional menggambarkan cara kerja sama antar lima negara awal ASEAN dalam hal ini melalui IAI dengan negara CLMV, termasuk Vietnam dalam mendukung negara-negara CLMV untuk mencapai standar pembangunan yang setara dengan anggota ASEAN lainnya. Pendekatan ini mencakup berbagai program seperti peningkatan kapasitas, transfer teknologi, dan pengembangan infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi.

Melalui konsep kerja sama regional, kita dapat melihat bagaimana IAI melalui *IAI Work Plan* memfasilitasi penguatan ekonomi nasional Vietnam dengan mempromosikan integrasi yang lebih erat dalam komunitas regional ASEAN. Program-program yang diimplementasikan melalui *IAI Work Plan* membantu Vietnam dalam mengembangkan kapasitas lokal, mempercepat modernisasi teknologi, dan meningkatkan infrastruktur yang pada akhirnya memperkecil kesenjangan pembangunan dalam aspek ekonomi. Kerja Sama Regional, dalam hal ini, menunjukkan pentingnya kerja sama antar negara-negara yang berada dalam satu kawasan regional dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh kawasan, serta bagaimana Vietnam mendapat manfaat dari integrasi tersebut untuk memperkuat dan menstabilkan ekonominya dalam konteks ASEAN yang lebih luas.

2. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi melibatkan transformasi ekonomi melalui penerapan teknologi canggih dan mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan standar hidup. Proses ini mencakup perbaikan infrastruktur serta mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan kelembagaan dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan penyediaan barang serta jasa yang lebih berkualitas. Selain itu, proses ini juga berfokus pada pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Panth, 2021).

Dalam penelitian berjudul "Peran Initiative for ASEAN Integration dalam mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi di Vietnam melalui IAI Work Plan III," konsep pembangunan ekonomi akan menjadi landasan penting untuk menilai secara menyeluruh dampak IAI Work Plan III terhadap kemajuan ekonomi Vietnam. Penelitian ini akan diawali dengan analisis pendapatan per kapita sebagai indikator utama pembangunan ekonomi, yang akan memberikan gambaran tentang pendapatan rata-rata per kapita di Vietnam dan perubahannya selama implementasi IAI Work Plan III. Selain itu, penelitian ini juga akan mencakup evaluasi rinci mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yang akan memberikan pandangan menyeluruh tentang tren kesejahteraan ekonomi Vietnam serta kemajuannya menuju ekonomi industri modern.

Untuk mendalami analisis, penelitian ini juga akan mempertimbangkan berbagai indikator standar hidup, seperti angka harapan hidup, tingkat kematian bayi, tingkat melek huruf, status gizi, dan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan. Indikator-indikator ini akan memberikan perspektif kualitatif mengenai bagaimana kemajuan ekonomi telah mempengaruhi kualitas hidup masyarakat Vietnam secara keseluruhan. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, penelitian ini akan menyoroti sejauh mana pertumbuhan ekonomi telah berhasil meningkatkan kondisi kehidupan, yang mencerminkan dampak lebih luas dari IAI Work Plan III di luar sekadar peningkatan pendapatan.

Selain itu, distribusi pendapatan juga akan menjadi fokus utama dalam

penelitian ini, dengan tujuan untuk memahami apakah manfaat ekonomi telah tersebar secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Aspek ini sangat penting untuk menilai standar hidup yang representatif bagi sebagian besar masyarakat dan mengevaluasi keberhasilan IAI Work Plan III dalam mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi perubahan struktur ekonomi, kemajuan teknologi, dan perbaikan kelembagaan yang terjadi sebagai bagian dari proses pembangunan ekonomi. Elemen-elemen ini penting untuk memahami sifat pembangunan ekonomi yang komprehensif, yang mencakup tidak hanya pertumbuhan kuantitatif tetapi juga peningkatan kualitatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dengan menggabungkan berbagai variabel ini, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran holistik mengenai pembangunan ekonomi di Vietnam, menunjukkan bagaimana IAI Work Plan III berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempromosikan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Pendekatan multidimensi ini akan menekankan pentingnya IAI dalam perjalanan Vietnam menuju modernisasi ekonomi dan upaya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di kawasan ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga mengenai efektivitas inisiatif integrasi regional dalam mendorong pembangunan ekonomi yang seimbang dan inklusif, dengan menekankan pentingnya upaya terkoordinasi untuk mengangkat daerah-daerah yang kurang berkembang dan memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara luas.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (sebagaimana dikutip dalam (Abdussamad, 2021), penelitian kualitatif melibatkan studi tentang objek dalam latar alamiahnya, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan lebih berfokus pada interpretasi daripada generalisasi. Metode ini menekankan pada pengumpulan data non-numerik.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kerangka yang sama, yang akan menjadi masukan yang berharga dalam hal konsep, konteks, dan analisis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti akan mengkaji bagaimana implementasi *IAI Work Plan III* di Vietnam serta dampak dari pengimplementasian *IAI Work Plan III* dalam mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi di Vietnam. Melalui pendekatan ini menghasilkan data kualitatif yang mana nantinya akan dikumpulkan oleh penulis dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan gambar yang mendukung penjelasan mengenai topik permasalahan yang akan diteliti.

2. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain, namun dapat digunakan kembali untuk analisis atau penelitian baru,

atau dengan kata lain data sekunder ini didapatkan melalui studi literatur. Jenis data ini sering kali berasal dari sumber seperti publikasi akademis (jurnal, buku, dan artikel), laporan resmi pemerintah, database online, arsip organisasi. Walaupun begitu hal yang peneliti perlu diperhatikan dalam menggunakan data sekunder yaitu terkait dengan validitas, reliabilitas, dan relevansi data yang digunakan, serta mempertimbangkan konteks asal data untuk memastikan kesesuaian dengan pertanyaan penelitian mereka.

3. Metode Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan atau teknik tinjauan literatur. Eksplorasi mendalam terhadap literatur yang relevan terkait dengan topik akan dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen. Peneliti mengumpulkan data melalui literatur yang berkaitan dengan implementasi *IAI Work Plan*, dan dampak dari pengimplementasiannya. Selain itu, pengumpulan informasi juga berkaitan dengan keberhasilan pengimplementasian *IAI Work Plan* dalam mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi di Vietnam.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menerapkan teknik analisis kualitatif. Bogdan (dalam Sugiyono, 2018) analisis data pada penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data, salah satu contohnya

adalah melalui studi literatur sehingga dapat lebih mudah dipahami dan temuan yang diperoleh dapat disusun dengan baik yang nantinya akan menjadi suatu tulisan yang bentuk skripsi. Analisis akan berfokus pada memberikan pemahaman mendalam mengenai *IAI Work Plan*, proses pengimplemetasian *IAI Work Plan* di Vietnam, dan pengaruh *IAI Work Plan* dalam mengatasi kemiskinan di Vietnam.

H. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan alur sistematika penulisan penelitian yang dijabarkan ke dalam lima bab, yaitu :

BAB 1 Pendahuluan yang mana pada bab ini berisi latar belakang penelitian, perbatasan masalah serta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka merupakan bab yang berisi penelitian terdahulu yang nantinya akan membantu penelitian sekaligus memberi gambaran tentang perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian yang sudah pernah terlaksanakan. Bab ini juga akan dijelaskan secara juga terkait tinjauan pustaka terkait konsep Kerja sama Regional dan Pembangunan Ekonomi.

BAB 3 Gambaran Umum dalam bab ini akan dijelaskan secara umum dan komprehensif tentang data variabel penelitian yang akan dianalisis. Bagian awal dari bab ini akan mengulas secara menyeluruh tentang kesenjangan ekonomi di vietnam, yang meliputi dengan penjelasan apa saja yang menjadi faktor yang membuat adanya kesenjangan ekonomi di negara tersebut. Lebih lanjut, akan

dibahas secara mendalam mengenai latar belakang dan apa saja yang sudah dilakukan oleh IAI melalui kerangka kerja *IAI Work Plan* terkhususnya yang ke-3, di bagian ini juga akan disebutkan mengenai hasil dari IAI Work Plan sebelumnya dan keberlanjutan setelah *IAI Work Plan III*.

BAB 4 Pembahasan yang mana dalam bab ini akan memberi penjelasan terkait hasil dari penelitian dan analisa yang dilakukan oleh penulis. Hasil ini kemudian akan menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Analisa yang dimaksudkan disini adalah analisa program dari Initiative for ASEAN Integration yaitu *IAI Work Plan* yang mana program ini membantu 4 negara baru yang bergabung dengan keanggotaan ASEAN, CLMV, terkhususnya pada penelitian ini akan lebih dikhususkan ke Vietnam.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran berisi rangkuman hasil penelitian yang akan disajikan dalam bentuk kesimpulan yang menjawab keseluruhan penelitian. Serta pada bab ini penulis akan memberikan saran terkait keberlanjutan penelitian yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berfokus pada kajian literatur mengenai dua konsep utama yang digunakan dalam analisis penelitian, yaitu konsep Kerja Sama Regional dalam studi hubungan internasional dan konsep Pembangunan Ekonomi. Pembahasan dimulai dengan penjelasan terkait konsep-konsep tersebut, diikuti dengan telaah literatur dan penelitian terdahulu yang relevan. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kedua konsep tersebut serta bagaimana konsep-konsep tersebut diimplementasikan dalam penelitian yang ada. Selain itu, tinjauan terhadap literatur sebelumnya dilakukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel penting yang dapat memberikan kontribusi bagi penelitian ini. Dengan menyusun kerangka teoritis berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, bab ini menyediakan landasan akademis yang kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini serta membantu dalam merumuskan hipotesis dan strategi penelitian yang lebih terarah.

A. Kerja Sama Regional

Kerja sama regional merupakan aspek fundamental dalam hubungan internasional yang memfasilitasi tindakan kolektif antarnegara untuk mengatasi tantangan bersama dan mencapai tujuan bersama. Dalam tulisan Abegunde (2021) menjelaskan bagaimana kerja sama regional mempengaruhi kedaulatan negara, dengan fokus pada teori-teori yang menjelaskan hubungan antara integrasi regional dan kedaulatan nasional. Dalam tulisannya juga mencangkup pandangan dari ahli seperti John Akokpari yang menyatakan bahwa kerja sama regional mencakup

segala bentuk kolaborasi antar negara untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengorbankan kepentingan individu yang beragam.

.Konsep ini telah berkembang dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh berbagai kerangka teori dan pertimbangan praktis. Salah satu teori utama yang menjelaskan kerja sama regional adalah Teori Stabilitas Hegemoni (HST). Gilpin (1987: 87-90) menyatakan bahwa kekuatan dominan atau hegemon berperan penting dalam menciptakan dan mempertahankan tatanan internasional dengan menyediakan barang publik dan menegakkan aturan yang memfasilitasi kerja sama antarnegara. Konsep ini juga diterapkan dalam konteks regional, di mana negara-negara kuat bertindak sebagai "pembayar regional."

Mattli (1999a: 56) memperluas gagasan ini dengan mengemukakan bahwa keberhasilan kerja sama regional seringkali membutuhkan kehadiran negara terkemuka yang bersedia dan mampu menanggung biaya terkait proses integrasi. Peran negara ini meliputi upaya untuk mengurangi ketegangan distribusi di antara negara-negara yang terlibat, sehingga mempermudah jalan menuju kerja sama yang lebih mendalam. Grieco (1997) juga mendukung pandangan ini, menekankan bahwa kepemimpinan hegemonik dapat mengurangi kekhawatiran akan keuntungan relatif yang seringkali menghambat kolaborasi di antara negara-negara berdaulat yang khawatir akan ketidaksetaraan manfaat.

Para akademisi ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa kehadiran hegemon yang baik hati dapat memberikan stabilitas dan insentif yang diperlukan untuk kerja sama regional, karena negara pemimpin dapat menanggung biaya awal

dan mengatasi masalah tindakan kolektif yang tidak dapat diselesaikan oleh negara-negara yang lebih kecil atau kurang kuat.

Sebaliknya, Walt (1987) mengajukan konsep keseimbangan ancaman, yang menyatakan bahwa negara-negara cenderung berkorelasi secara regional bukan dengan bersekutu dengan kekuatan besar, tetapi dengan membentuk aliansi untuk melawan ancaman yang mereka rasakan. Dalam perspektif ini, kerja sama regional berkembang sebagai respons strategis terhadap ancaman eksternal, di mana negara-negara bersatu untuk meningkatkan keamanan mereka dan melindungi kedaulatan dari kekuatan dominan, baik regional maupun global.

Pendekatan ini menekankan pentingnya pengaturan keamanan kolektif dalam membangun kerja sama regional, dengan menyatakan bahwa kekhawatiran bersama akan ancaman keamanan mendorong negara-negara untuk berkoordinasi, sehingga menciptakan kerangka kerja yang mendorong stabilitas dan mencegah agresi. Sudut pandang ini menggarisbawahi interaksi antara dinamika kekuatan dan kepentingan strategis dalam pembentukan aliansi regional dan lembaga kerja sama.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemahaman mengenai kerja sama regional telah meluas, tidak hanya mencakup isu-isu keamanan dan kekuasaan tetapi juga tujuan ekonomi dan pembangunan. Bruszt dan Palestina (2020) berpendapat bahwa kerja sama regional kini sering berfungsi sebagai platform untuk memfasilitasi akses ke pasar global, menarik investasi asing langsung, dan mendorong pembangunan industri. Perspektif ini melihat kerangka kerja regional sebagai mekanisme untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan,

dan meningkatkan kesejahteraan sosial di antara negara-negara anggota.

Kerja sama ini biasanya melibatkan koordinasi kebijakan ekonomi, pengurangan hambatan perdagangan, dan pelaksanaan proyek pembangunan bersama. Fokus pada integrasi ekonomi mencerminkan pergeseran pengakuan atas manfaat dari kerja sama regional yang beragam, termasuk pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan perlindungan sosial.

Aspek lain yang penting dalam literatur kerja sama regional adalah dinamika politik domestik yang mempengaruhi pendekatan negara terhadap kerja sama atau konflik regional. Solingen (1998) mengemukakan bahwa koalisi domestik dan struktur politik memainkan peran penting dalam membentuk sikap suatu negara terhadap kerja sama regional. Pendekatan ini tidak hanya ditentukan oleh lembaga demokrasi liberal, tetapi juga oleh kepentingan politik internal, prioritas ekonomi, dan tekanan dari masyarakat. Analisis Solingen menunjukkan bahwa aktor domestik dapat memanfaatkan kerja sama regional untuk memajukan agenda nasional, mendapatkan legitimasi politik, atau mengakses peluang ekonomi. Namun, oposisi internal atau kepentingan yang bertentangan juga dapat menghambat upaya kerja sama. Perspektif ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor internal berinteraksi dengan lingkungan eksternal dalam mempengaruhi keterlibatan negara dalam kerangka kerja regional.

Perkembangan studi kerja sama regional, khususnya dalam konteks integrasi Uni Eropa (UE), telah menghasilkan perbedaan antara kerja sama regional dan integrasi regional. Adler dan Barnett (1998) menyatakan bahwa kerja sama

regional melibatkan kolaborasi antarpemerintah untuk mengatasi isu-isu tertentu melalui kebijakan terkoordinasi dan inisiatif bersama, dengan tetap mempertahankan kedaulatan negara sambil memfasilitasi tindakan kolektif dalam bidang perdagangan, keamanan, dan perlindungan lingkungan.

Sebaliknya, integrasi regional melibatkan tingkat kolaborasi yang lebih mendalam, yang ditandai dengan pembentukan lembaga supranasional yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat bagi negara-negara anggota. Scharpf (1996) menekankan fungsi-fungsi seperti penghapusan hambatan nasional terhadap pertukaran ekonomi dan sosial (pembuatan pasar) serta penanganan eksternalitas negatif yang timbul dari liberalisasi (koreksi pasar). Proses ini seringkali melibatkan penyerahan sebagian kedaulatan nasional untuk mencapai kebijakan yang lebih komprehensif dan seragam di seluruh kawasan. UE merupakan contoh utama di mana integrasi telah mengarah pada pembentukan lembaga-lembaga seperti Komisi Eropa dan Pengadilan Eropa, yang memiliki kekuasaan pengambilan keputusan yang signifikan yang mempengaruhi semua negara anggota. Perbedaan ini menggarisbawahi kedalaman dan cakupan yang bervariasi dari upaya kolaboratif regional dan implikasinya terhadap kedaulatan nasional dan otonomi kebijakan.

Kerja sama regional juga memainkan peran dalam memperkuat rezim politik, baik yang demokratis maupun otoriter. Levitsky dan Way (2010) meneliti bagaimana negara-negara menggunakan organisasi regional untuk "mengunci" perkembangan demokrasi dengan menanamkan norma dan praktik demokrasi dalam kerangka kerja regional. Proses ini seringkali melibatkan pembentukan

mekanisme pengawasan dan sanksi peradilan untuk memastikan kepatuhan dan meningkatkan stabilitas politik.

Di sisi lain, Söderbaum (2004) menjelaskan bagaimana rezim otoriter dapat menggunakan kerja sama regional untuk memperkuat kedaulatan dan legitimasi mereka. Melalui partisipasi dalam organisasi regional, pemerintahan ini dapat memperoleh pengakuan internasional, mengakses manfaat ekonomi, dan menahan tekanan eksternal untuk melakukan reformasi politik. Dualitas ini menunjukkan bahwa kerja sama regional dapat digunakan untuk berbagai tujuan politik, tergantung pada bagaimana negara-negara tersebut berinteraksi dan memanfaatkan struktur regional.

Secara keseluruhan, konsep kerja sama regional telah mengalami evolusi yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai kontribusi teoritis dan praktis. Teori-teori awal yang berfokus pada stabilitas hegemonik dan keseimbangan kekuatan telah berkembang untuk mencakup dimensi ekonomi, pembangunan, dan politik domestik (Börzel, 2013). Perbedaan antara kerja sama dan integrasi telah memperjelas pemahaman kita tentang kedalaman dan mekanisme kolaborasi regional. Selain itu, peran kerja sama regional dalam mendukung berbagai rezim politik menunjukkan sifatnya yang multifaset dan kemampuannya beradaptasi dalam berbagai konteks (Börzel, 2013).

B. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses berkelanjutan yang dilakukan oleh suatu negara atau wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan

ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Proses ini mencakup berbagai upaya untuk memperluas kapasitas produksi, menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, pembangunan ekonomi juga melibatkan peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan institusi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Teori pembangunan ekonomi yang diuraikan oleh Lestari et al. (2021) mencakup beberapa pandangan klasik dari tokoh-tokoh seperti Arthur Lewis dan Rostow. Arthur Lewis menyoroti perbedaan antara ekonomi perkotaan yang lebih maju dengan sektor industri sebagai fokus utamanya. Ia menekankan pentingnya mengalihkan tenaga kerja surplus dari pedesaan untuk mendukung pertumbuhan sektor industri di perkotaan. Menurut Lewis, tenaga kerja yang berlebihan di pedesaan yang hidup dalam kondisi subsistem harus dialihkan ke sektor industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Sementara itu, Rostow menawarkan model pembangunan ekonomi yang terdiri dari lima tahap: masyarakat tradisional, prasyarat tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi. Rostow berpendapat bahwa pembangunan ekonomi adalah proses transformasi yang melibatkan perubahan signifikan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Setiap tahap dalam model ini menggambarkan perubahan spesifik yang diperlukan dalam ekonomi dan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Seiring perkembangan literatur, pandangan tradisional mengenai pembangunan yang hanya fokus pada akumulasi modal telah berkembang menuju

pendekatan yang lebih multidimensi. Naqvi (1993) menunjukkan bahwa ekonomi pembangunan telah mengalami evolusi pemahaman yang lebih luas dari sekadar akumulasi modal menuju pendekatan multidimensi yang mencakup peningkatan standar hidup, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan keberlanjutan. Ia menekankan bahwa ruang lingkup ekonomi pembangunan kini melibatkan distribusi pendapatan, keadilan sosial, dan pertimbangan etika, yang mencerminkan tantangan dunia nyata di mana pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, literatur mengindikasikan pergeseran dari penggunaan indikator tradisional seperti PDB ke ukuran pembangunan manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, sebagai alat utama untuk menilai keberhasilan pembangunan. Stabilitas makroekonomi juga diidentifikasi sebagai elemen krusial, dengan fokus pada kebijakan fiskal dan moneter yang seimbang. Naqvi juga mengategorikan faktor pendorong pertumbuhan ke dalam aspek demografi, sumber daya manusia, dan produktivitas, serta menekankan pentingnya pengelolaan pertumbuhan penduduk, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, dan peningkatan produktivitas melalui teknologi serta efisiensi sumber daya. Pada akhirnya, literatur ini menekankan perlunya integrasi dimensi sosial dan etika dalam strategi pembangunan, menunjukkan pergeseran dari model pertumbuhan tradisional ke pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Melengkapi pandangan Naqvi, Panth (2021) membahas transformasi ekonomi yang menekankan peningkatan teknologi, produktivitas tenaga kerja, serta standar hidup, yang juga mencakup perbaikan infrastruktur dan kondisi sosial, politik, serta kelembagaan. Dalam perspektif sejarah, pembangunan ekonomi

bersifat relatif, dengan contoh negara-negara seperti India, Cina, dan Yunani yang pernah menjadi pusat kemajuan, sementara Eropa mengalami pertumbuhan pesat selama Revolusi Industri melalui eksploitasi kolonial dan kemajuan teknologi. Panth mengkritisi konsep keterbelakangan yang muncul akibat eksploitasi kolonial, yang menciptakan ketidaksetaraan global dan menyebabkan kemunduran ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya makmur, seperti India akibat penjajahan Eropa. Ia juga menyoroti keterbatasan metode pengukuran pembangunan ekonomi tradisional seperti PDB dan tingkat pendapatan, yang tidak menangkap aspek sosial dan lingkungan. Kritik terhadap penggunaan istilah "terbelakang" dan "negara berkembang" juga disampaikan, karena dianggap mengandung konotasi negatif dan mengabaikan kekayaan sejarah serta kontribusi budaya negara-negara tersebut. Pentingnya pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan pelestarian lingkungan, seperti yang dipromosikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, menjadi penekanan utama Panth dalam mengadvokasi pemahaman yang lebih inklusif dan berkelanjutan tentang kemajuan ekonomi. Kedua pandangan ini bersama-sama menyoroti pergeseran fokus dalam ekonomi pembangunan menuju pendekatan yang lebih komprehensif, yang mempertimbangkan tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan.

Meskipun berbagai teori pembangunan ekonomi telah berkembang, kesenjangan pembangunan antarwilayah ataupun antarnegara tetap menjadi tantangan yang signifikan. Perbedaan akses terhadap sumber daya, pendidikan, teknologi, dan infrastruktur menyebabkan ketimpangan dalam pencapaian

ekonomi. Negara-negara dengan tingkat investasi yang lebih tinggi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan negara-negara yang mengalami keterbatasan dalam aspek tersebut.

Hal ini dapat dilihat jelas dalam tulisan Mazumdar (2016) yang menyoroti perbedaan mendasar dalam pembangunan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang atau kurang berkembang. Dalam studi yang dilakukan oleh Mazumdar mengungkapkan bahwa kesenjangan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor struktural yang membuat negara berkembang sulit mengejar ketertinggalan. Faktor-faktor tersebut meliputi perbedaan dalam sumber daya alam dan manusia, tidak meratanya tingkat pendapatan, serta sulitnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Negara maju lebih mengedepankan investasi sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan yang berujung pada peningkatan produktivitas dalam sektor ekonomi. Di lain sisi, negara berkembang ada kalanya masih mengalami kesulitan dalam menghadapi tantangan penyediaan layanan dasar untuk masyarakatnya, sehingga menciptakan lingkaran ketimpangan yang sulit diputus.

Globalisasi memainkan peran yang kompleks dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara terutama pada negara berkembang. Akan tetapi, disaat yang bersamaan hal itu juga yang bisa memperdalam kesenjangan pembangunan antara negara maju dan negara berkembang. Salah satu aspek utama dari globalisasi adalah peningkatan perdagangan internasional, yang memberikan peluang bagi negara berkembang untuk memasuki pasar global. Namun, manfaat

dari perdagangan ini tidak selalu terdistribusi secara merata. Negara maju seringkali mendominasi perdagangan dengan mengontrol rantai pasokan global dan memiliki akses terhadap teknologi yang lebih maju. Sementara itu, banyak negara berkembang hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah atau tenaga kerja murah, yang membuat mereka tetap dalam posisi subordinat dalam sistem ekonomi global.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dan integrasi regional ASEAN telah banyak dikaji oleh para ahli, dengan fokus yang beragam mulai dari kebijakan publik, dampak integrasi perdagangan, hingga peran institusi lokal dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Para peneliti memberikan perspektif yang berbeda mengenai faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di ASEAN serta tantangan yang dihadapi dalam menciptakan kawasan ekonomi yang terintegrasi dan inklusif. Dalam kajian ini, beberapa penelitian terdahulu memberikan dasar analitis yang kuat untuk memahami perkembangan ekonomi di ASEAN dan bagaimana upaya integrasi regional dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan jangka panjang di kawasan ini.

Hal Hill (1994) memberikan salah satu kajian paling komprehensif mengenai perkembangan ekonomi di negara-negara ASEAN, yang mencakup Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Hill menyoroti bahwa meskipun kawasan ini hanya mewakili sekitar 1,5% dari ekonomi dunia, negara-negara ASEAN menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih cepat

dibandingkan banyak wilayah lain. Hill menekankan bahwa pertumbuhan tersebut bukanlah semata-mata hasil dari keberuntungan, tetapi didorong oleh kebijakan publik yang pragmatis dan efektif. Misalnya, liberalisasi sektor perbankan, pengurangan proteksi perdagangan, dan reformasi pajak telah menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan perdagangan di kawasan ini. Selain itu, Hill juga menyoroti bagaimana negara-negara ASEAN telah membangun identitas dan solidaritas regional yang semakin kuat, dengan fokus pada kerjasama ekonomi dan politik, meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti ketimpangan distribusi hasil pertumbuhan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan, serta peningkatan utang eksternal di beberapa negara. Hill mengakui bahwa meskipun ASEAN berhasil membangun kerjasama yang kuat, tantangan-tantangan ini tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi agar pertumbuhan yang inklusif dapat tercapai.

Sementara itu, Kiki Verico (2017) lebih berfokus pada peran ASEAN Free Trade Area (AFTA) sebagai pilar utama dalam integrasi ekonomi ASEAN. Menurut Verico, AFTA telah memainkan peran penting dalam menghilangkan hambatan perdagangan antar negara anggota ASEAN, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan perdagangan intra-regional dan menarik investasi asing langsung (FDI). Verico menyatakan bahwa AFTA, dengan langkah-langkah liberalisasi tarif yang diterapkannya, berhasil meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai destinasi investasi global, terutama bagi negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan China yang terlibat dalam kerangka kerja ASEAN-PLUS. Namun, Verico juga mencatat bahwa dampak dari AFTA ini tidak merata di antara

negara-negara anggota. Negara-negara yang lebih maju, seperti Singapura dan Malaysia, mendapatkan manfaat yang lebih besar dari integrasi ekonomi ini, sementara negara-negara yang kurang berkembang, seperti Kamboja dan Myanmar, masih menghadapi tantangan besar dalam memaksimalkan manfaat dari integrasi regional. Kesenjangan ini, menurut Verico, merupakan tantangan utama yang harus diatasi ASEAN agar integrasi ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih merata di seluruh kawasan. Selain itu, Verico menekankan pentingnya kerangka ASEAN-PLUS, seperti ASEAN+3 (yang mencakup China, Jepang, dan Korea Selatan), dalam memperluas integrasi ASEAN menuju investasi dan keuangan yang lebih stabil, yang merupakan kunci bagi daya saing jangka panjang kawasan ini di pasar global.

Prajanto (2022) mendukung pandangan Verico mengenai dampak positif AFTA terhadap FDI, tetapi ia lebih menekankan bagaimana FDI berperan dalam mentransfer teknologi dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja di negara-negara ASEAN, terutama di negara berkembang. Menurut Prajanto, FDI bukan hanya tentang aliran modal, tetapi juga membawa keuntungan jangka panjang melalui peningkatan kapasitas industri dan daya saing internasional. Dalam hal ini, Prajanto menyoroti pentingnya FDI bagi pembangunan sektor industri dan modernisasi ekonomi negara-negara ASEAN yang lebih kecil, seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja. Ia juga menyatakan bahwa meskipun liberalisasi perdagangan melalui AFTA telah menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif di ASEAN, negara-negara yang lebih kecil dan kurang berkembang masih menghadapi tantangan dalam sepenuhnya memanfaatkan potensi FDI. Oleh karena itu, Prajanto

menekankan perlunya kerjasama yang lebih erat antar negara anggota ASEAN untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa manfaat dari integrasi ekonomi dapat dirasakan oleh semua negara anggota, bukan hanya negara-negara yang lebih maju.

Studi oleh Melissa Dell, Nathan Lane, dan Pablo Querubin (2018) memberikan perspektif historis yang berbeda mengenai bagaimana institusi lokal dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi jangka panjang. Menggunakan Vietnam sebagai studi kasus, mereka menemukan bahwa wilayah yang lebih lama terekspos pada institusi administratif yang lebih terpusat, seperti Dai Viet di Vietnam Utara, mengalami hasil ekonomi yang lebih baik selama 150 tahun terakhir dibandingkan wilayah Vietnam Selatan yang kurang terekspos pada institusi ini. Mereka, berpendapat bahwa institusi lokal yang kuat mendorong kerjasama dalam pengelolaan barang publik dan redistribusi, yang pada gilirannya memperbaiki kinerja ekonomi jangka panjang. Meskipun institusi formal dari periode pra-kolonial telah hilang, norma-norma sosial terkait kerjasama lokal tetap bertahan dan terus mempengaruhi pembangunan ekonomi hingga hari ini. Relevansi penelitian ini bagi ASEAN terletak pada bagaimana perbedaan dalam institusi dan kapasitas negara dapat mempengaruhi kemampuan negara-negara untuk berintegrasi secara ekonomi dan memperoleh manfaat dari kerjasama regional. Dalam konteks ASEAN, institusi yang lebih kuat di negara-negara maju memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari integrasi ekonomi, sementara negara-negara dengan institusi yang lebih lemah cenderung tertinggal, sebagaimana yang diungkapkan oleh Verico dan Hill.

Perbedaan utama dalam penelitian ini dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya terletak pada pendekatan dan objek kajian yang lebih spesifik. Sebagian besar penelitian terdahulu menelaah integrasi ekonomi ASEAN dari perspektif kebijakan perdagangan bebas dan investasi serta dampaknya pada tingkat makro. Misalnya, Verico (2017) menyoroti peran AFTA dalam meningkatkan daya saing regional, sementara Prajanto (2022) membahas kontribusi FDI terhadap modernisasi industri di ASEAN. Sementara itu, penelitian ini lebih terfokus pada implementasi kebijakan yang bersifat inklusif dan ditujukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Dengan menggunakan Vietnam sebagai studi kasus, penelitian ini mengevaluasi efektivitas IAI Work Plan III sebagai instrumen ASEAN dalam mengatasi ketimpangan ekonomi antar negara anggota, terutama bagi negara-negara berkembang yang menghadapi kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan infrastruktur.

Selain itu, dalam penelitian ini juga berbeda dari kajian Dell, Lane, dan Querubin (2018) yang mana pada penelitian tersebut lebih menekankan pada faktor historis dan institusional dalam menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di Vietnam. Pada tulisan Dell, Lane, Querubin menunjukkan bagaimana sejarah administrasi dan kapasitas institusi lokal berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang, sementara penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan kontemporer ASEAN dalam mendukung pembangunan ekonomi di Vietnam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan tidak hanya melihat faktor struktural yang telah ada sejak lama, tetapi juga menganalisis bagaimana intervensi kebijakan regional dapat menciptakan perubahan nyata dalam

pembangunan ekonomi negara-negara berkembang di ASEAN.

Secara keseluruhan, penelitian sebelumnya memberikan gambaran luas tentang dinamika pertumbuhan ekonomi ASEAN, dengan menyoroti faktor-faktor seperti kebijakan perdagangan, investasi, dan institusi lokal. Namun, penelitian ini menambahkan perspektif baru dengan menganalisis peran kebijakan ASEAN yang spesifik dalam mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi di Vietnam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian yang ada, tetapi juga memberikan wawasan praktis mengenai bagaimana inisiatif seperti IAI Work Plan III dapat menjadi alat yang efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif di ASEAN.